

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Saat ini sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran, hal ini menyebabkan menurunnya kelestarian alam dan fungsi lingkungan itu sendiri. Salah satu faktor terbesar eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Sederet permasalahan yang terjadi di tiap penjuru daerah tentang kerusakan lingkungan bermuara dari tingkah laku manusia dan campur tangan manusia terhadap alam. Menempatkan kepentingan sendiri dengan tidak memperdulikan alam dan lingkungan sekitar mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan banyak masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kegiatan penambangan merupakan salah satu faktor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, banyak kita amati bahwa aktivitas pertambangan sering kali merugikan masyarakat di sekitar area pertambangan (Nordiansah & Resdiana, 2022). Pada tahun 1994 hingga 1999, Sub Direktorat Eksplorasi Mineral Industri dan Bantuan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah wilayah di pulau Madura. Mereka menemukan banyak potensi fosfat di Madura, dengan Sampang memiliki sekitar 5.000.000 m², Pamekasan memiliki sekitar 23.400 m² dan di wilayah Sumenep memiliki sekitar 827.500 m². Atas data yang telah ditemukan, rencana pertambangan fosfat di Madura terkhusus di kabupaten Sumenep mulai dilakukan.

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, dengan memiliki jumlah penduduk dengan kisaran 1,1 juta jiwa yang tersebar di 27 kecamatan dan 332 desa. Sumenep memiliki keunikan tersendiri karena bahasanya yang cenderung lebih halus dibanding dengan kabupaten di Pulau Madura lainnya (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan). Menurut Denys Lombard (2000) Pulau Madura terdiri dari barisan bukit-bukit kapur, Madura termasuk dalam gugusan bukit kapur yang dimulai dari Blora (Gunung Kendeng)

membentang hingga Pulau Madura. Kabupaten Sumenep memiliki Kawasan bentang alam batu karst (kapur), baik itu di kepulauannya maupun di daratannya.

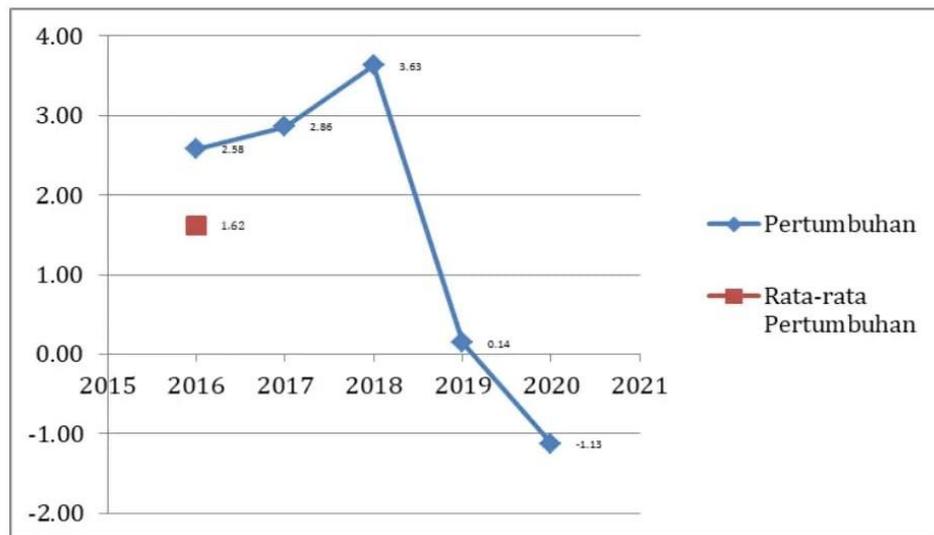
Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur mengatakan bahwa kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki sumber fosfat. Hal ini menyebabkan potensi fosfat di kabupaten Sumenep dapat dikembangkan secara modern maupun tradisional (Tamimi, 2020). Fosfat merupakan sebuah bentuk fosfor yang bisa digunakan oleh tumbuhan dan merupakan zat penting bagi tumbuhan dan alga sehingga dapat menjaga unsur perairan (Bahri & Faizal, 2006). Sistem agraris salah satunya di sektor pertanian tidak berkembang di Madura mengakibatkan besarnya tuntutan ekonomi sehingga menimbulkan dorongan masyarakat Madura untuk meninggalkan kampung halamannya (Susanto, 2011).

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding kabupaten lainnya di pulau Madura. Hal ini karena didukung oleh potensi pariwisata sejarah dan pantai. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah kabupaten Sampang karena pertanian masih menjadi sumber pokok pendapatan masyarakatnya (Fajrin & Sudarsono, 2019). Tidak berkembangnya sistem pertanian di Madura mengakibatkan banyak masyarakatnya untuk meninggalkan pulau Madura karena tuntutan ekonomi masyarakatnya (Razy & Mahzuni, 2021). Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi pemerintah dari setiap kabupaten di Pulau Madura masih jauh dibawah Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di setiap kabupatennya rata-rata hanya 2,39% dibanding dengan provinsi Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai 3.93% (Madurapers, 2021a).

Dibangunnya jembatan Suramadu menjadi sebuah jembatan terpanjang di Indonesia (5,5 km) memiliki harapan untuk menumbuhkan perekonomian di pulau Madura akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan (Oktavia, 2018). Hasil temuan dari Rizky Yuwono menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Madura tidak mendapatkan hasil yang signifikan semenjak diresmikannya jembatan Suramadu. Akan tetapi, justru mengalami ketertinggalan

dari kota di sekitarnya seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Kurangnya inisiasi untuk menghadirkan sebuah industri menyebabkan minimnya investasi, hal ini menyebabkan pulau Madura dianggap tidak menguntungkan meskipun telah memiliki jembatan Suramadu (Adharsyah, 2019).

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020



Sumber: madurapers.com dan BPS Kabupaten Sumenep

Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep masih cukup rendah. Menurut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita ADHK periode 2016 hingga 2020, rata-rata laju pertumbuhannya hanya 1,62% masih jauh dibawah provinsi Jawa Timur yang menyentuh 3,93% (Madurapers, 2021b). Akan tetapi, saat ini pemerintah kabupaten Sumenep melalui program kewirausahaan pesantren memiliki cita-cita untuk melahirkan santripreneur atau wirausaha santri. Dengan jumlah pesantren di Kabupaten Sumenep yang mencapai 300, diharapkan program ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep (Romza, 2021).

Pada Tahun 2013 Pemerintah kabupaten Sumenep membuat Peraturan Daerah dengan Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033. Pada bab IV paragraph 5 pasal 33 tertuang tentang

kawasan lindung geologi ayat (2) point (a) mengenai Kawasan cagar alam geologi berupa Kawasan lindung karst 1 yaitu ada di kecamatan Batu putih, Ganding dan Guluk-guluk. Dengan harapan, bahwasanya keberadaan pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep mampu mengangkat perekonomian masyarakatnya (Kominfo Jatim, 2022).

Tabel 1.1 Titik Lokasi Pertambangan Fosfat Perda RTRW Kab. Sumenep tahun 2013-2033

No	Lokasi Pertambangan
1.	Kecamatan Batuputih
2.	Kecamatan Ganding
3.	Kecamatan Manding
4.	Kecamatan Lenteng
5.	Kecamatan Guluk-guluk
6.	Kecamatan Gapura
7.	Kecamatan Arjasa
8.	Kecamatan Bluto

Sumber : RTRW Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013

Seluruh pertambangan fosfat di Sumenep tidak memiliki izin atau bisa disebut ilegal, meskipun hingga saat ini terdapat lokasi pertambangan ilegal yang telah ditutup oleh aparat kepolisian dan Satpol PP, namun hingga saat ini masih ada yang beroperasi (Winarko, 2022). Masyarakat memiliki alasan secara umum mengapa mereka melakukan pertambangan dengan tidak berizin, hal ini dikarenakan lahan tersebut milik pribadi dan mereka mengantungkan hidup di tambang (tambang rakyat). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Sumenep serta para ulama dan kyai di pondok pesantren untuk memberikan pemahaman serta pencerahan bagi para pemilik pertambangan ilegal bahwa mendirikan pertambangan tanpa ada izin resmi tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang pertambangan dan melanggar hukum.

Citra masyarakat Madura sebagai kaum santri sangatlah kuat. Hampir setiap masyarakat di setiap rumahnya memiliki tempat ibadah seperti langar atau surau (*Kobbhung*) untuk melakukan ibadah sholat dan ngaji (Hamzah et al., 2018). Ulama atau kyai memiliki ruang yang melekat dalam tatanan hidup masyarakat madura, oleh karena itu tidak menjadi sebuah hal yang berlebihan apabila ulama atau kyai memegang peranan penting dan menjadi pengaruh besar dalam ruang hidup masyarakat Madura. Menurut Kuntowijoyo (2022) bagi masyarakat Madura, agama menjadi alat perekat “*organizing principle*” yang menyatukan masyarakat Madura dengan berbagai karakternya.

Di era kapitalisasi politik saat ini, kekayaan sumber daya alam di Pulau Madura dalam konteks Kabupaten Sumenep telah mendorong para pemodal untuk berbondong-bondong melakukan ekspansi *frontier* kapitalisme. Peran kyai di Pulau Madura saat ini sangat krusial karena dihadapkan dengan dua pilihan dilematik yakni sebagai agen pencerah umat dan agen partai politik (Hamzah et al., 2018). Temuan menarik ditulis oleh (Affandi, 2021) dalam bukunya yang berjudul “Menjarah Ujung Timur Pulau Jawa” bahwasanya saat ini terdapat kyai yang telah berpatronase dengan elite pemerintah untuk mengambil kekayaan sumber daya alam di Sumenep.

Gambar 1.2 Peta Konsesi Blok Tambang Migas di Jawa Timur



Sumber: Walhi Jatim

Melalui PT Energi Mineral Langgeng (EML), para kyai dari pondok pesantren Tebu Ireng Jombang menjadi kontraktor dalam mengeksplorasi gas di Sumenep dan Situbondo. KH Abdul Hakim (Gus Kikin) menjadi tokoh utama dalam eksplorasi gas di Sumenep bersama Luhut Panjaitan (Affandi, 2021). Diketahui Gus Kikin merupakan keponakan dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan mantan presiden Republik Indonesia. Bukan tidak mungkin, bisnis pertambangan yang dilakukan oleh keluarga Gus Dur ini akan mendorong para ulama dan kyai lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

Pertambangan fosfat membuat alih fungsi lahan telah memberikan dampak yang cukup nyata berupa menyempitnya ruang hidup masyarakat di Sumenep. Alih fungsi lahan yang semakin luas menyebabkan semakin dahsyatnya krisis air dikarenakan menyusutnya area resapan air. Meskipun Pemda telah memfasilitasi dengan berdirinya perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), akan tetapi hal ini justru membuat semakin jauhnya akses masyarakat terhadap air dikarenakan hanya menjadi keuntungan pemodal. Dalam kasus ini, para ulama dan kyai memberikan argumentasi lantang bahwasanya aktivitas pertambangan fosfat akan mendatangkan kiamat air bagi masyarakat Sumenep di masa depan.

Merespon kebijakan dari Pemda untuk membuka ruang lebih lebar terkait dengan pertambangan fosfat, para kiai di Kabupaten Sumenep berkumpul di Forum Sumenep Hijau (FSH) untuk merumuskan penolakan tambang fosfat pada tanggal 11 Februari 2021 (Habiburrahman, 2021). Hal ini dilakukan sebagai wujud dari *amar ma'ruf nahi mungkar* karena melihat pertambangan fosfat akan semakin memperparah krisis sosio-ekologis/krisis alam. Penolakan dari para kiai yang berhimpun di FSH kembali dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021, dalam pertemuan ini dihadiri oleh beberapa tokoh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) seperti KH. Hafidzi Syarbani (Rois Syuriah PCNU Sumenep), KH. A. Pandji Taufik (Ketua Tanfidziyah PCNU Sumenep) dan tokoh eksekutif-legislatif Sumenep seperti Sekda Kab. Sumenep serta Hamid Ali Munir (Ketua DPRD Sumenep) (Supanjie, 2021).

Dalam pertemuan kedua ini, para kyai yang terhimpun di Forum Sumenep Hijau (FSH) di PP Assadad Ambunten merumuskan 4 poin, diantaranya: (1) Menolak segala kegiatan pertambangan di KBAK Kabupaten Sumenep karena akan memicu krisis air saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan serta dampak sosio-ekologis yang lain. (2) Masyarakat tidak siap dan tidak memiliki bekal pengetahuan dalam menanggulangi dampak yang akan ditimbulkan pertambangan. (3) Mengajak masyarakat Sumenep untuk bersama meneruskan kelestarian alam kepada anak-cucu pada saat ini dan masa yang akan datang (4) Mengajak masyarakat Sumenep untuk selalu ikhtiar dan membuat pengajian di Masjid dan Mushalla agar Sumenep bisa dihindarkan dari aktivitas yang akan merusak alam dan menimbulkan malapetaka (Habiburrahman, 2021).

Penolakan dari masyarakat untuk menolak penambangan fosfat terjadi karena masyarakat menilai bahwasanya tidak ada manfaat yang didapat. Bagi masyarakat, penambangan fosfat akan hanya menguntungkan para investor, bukan rakyat itu sendiri. Para petani nantinya akan diperas tenaganya menjadi buruh tambang, ini akan membuat kantong-kantong kemiskinan baru dan menambah sekelumit persoalan. Masyarakat berpendapat bahwasanya meluasnya lokasi pertambangan fosfat adalah sebuah ancaman perampasan lahan masyarakat. Saat ini kabupaten Sumenep pada saat musim kemarau selalu terjadi kekeringan, terdapat beberapa kecamatan yang paling kritis yaitu kecamatan Pasongsongan, kecamatan Talango dan kecamatan Batuputih (sumenepkab, 2022).

Sebuah organisasi kepemudaan yakni Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya juga telah melakukan sebuah upaya demonstrasi untuk menuntut pengusutan tuntas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan fosfat. Dalam aksi demonstrasi tersebut, MPR Madura Raya memiliki dua tuntutan untuk bupati Sumenep, yaitu: (1) menutup galian c dan meminta untuk menyalin berkas izin usaha pertambangan (IUP). (2) memberikan rekomendasi pencabutan izin pertambangan fosfat kepada Pemprov Jawa Timur yang kini dimiliki oleh perusahaan yang bermasalah (Suara Indonesia, 2022).

Konflik agraria merupakan persoalan pertentangan seperti yang dipaparkan oleh Hall *et al* (2011) yaitu *land exclusion*. Dalam hal ini, elite melihat bahwasanya tanah atau lahan dilihat dalam kerangka akses. Akses diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sebuah hal (*the ability to derive benefit from things*). Persoalan penambangan fosfat di kabupaten Sumenep membuat konflik baru antara masyarakat dan kyai dengan pemerintah serta investor tambang. Dampak lingkungan yang akan didapat masyarakat merupakan sebuah persoalan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah kabupaten Sumenep. Beberapa dampak persoalan akibat pertambangan fosfat di kabupaten Sumenep pastilah menjadi bahan penolakan masyarakat agar bisa menghindari dampak itu semua. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan temuan menarik bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumenep yang rendah membuat masyarakat berani untuk melakukan penambangan ilegal (tambang rakyat), serta faktor agama yang sangat kuat turut pula membuat sebuah gerakan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Politik Sumber Daya Alam: Potret Pertambangan Fosfat Bagi Kondisi Sosio-Ekologis Masyarakat Kabupaten Sumenep”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diawal, kajian ini merumuskan bahwa permasalahannya yaitu penambangan fosfat di Kabupaten Sumenep menimbulkan berbagai persoalan yang akan berdampak bagi masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan penolakan beragam kalangan masyarakat, dari kalangan petani hingga para kyai, mereka dengan lantang menyuarakan penolakan pertambangan fosfat karena akan hanya menimbulkan kerusakan alam. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut bagaimana dampak pertambangan fosfat terhadap krisis sosio-ekologis di Kabupaten Sumenep?.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana kekayaan sumber daya alam menyebabkan krisis sosial bagi masyarakat yang diakibatkan oleh pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep.
- 1.3.2. Untuk mengetahui krisis lingkungan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep.

1.4.Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

A. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat luas menjadi pedoman mengenai dampak krisis sosio-ekologis pertambangan terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- b. Bagi akademisi sebagai pendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam melakukan studi akademik mengenai dampak krisis sosio-ekologis yang dihasilkan oleh pertambangan.
- c. Bagi pemerintah sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan terkait eksplorasi sumber daya alam melalui pendekatan masyarakat sebagai solusi permasalahan pertambangan yang sangat kompleks.

B. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- i. Diharapkan dapat menambah referensi dalam karya ilmiah, khususnya untuk penelitian yang sejenis berikutnya di masa yang akan datang.

- ii. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkhusus Ilmu Pemerintahan dalam penelitian fenomena krisis sosio-ekologis masyarakat yang disebabkan sebuah pertambangan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 15 literatur review dari artikel jurnal yang berbeda-beda dan saling berkaitan dengan dampak pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk mencari tahu letak persamaan dari penelitian yang akan dikaji dan juga mencari informasi/data untuk mendapatkan perbedaan dari kajian-kajian oleh sebelumnya. Literatur pada penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: pertama, kajian tentang pertambangan fosfat secara umum, kedua, kajian tentang dampak pertambangan fosfat bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep, dan yang ketiga, kajian tentang dampak pertambangan Sumber Daya Alam bagi masyarakat.

Literatur yang mengkaji tentang pertambangan fosfat secara umum terdiri dari lima artikel jurnal yaitu riset yang dilakukan oleh (Nordiansah & Resdiana, 2022), (Nalle, 2016), (Hartanto & Suyoto, 2017), (Johan & Ediwarman, 2011), dan (Yulianti et al., 2020). Pertambangan fosfat atau golongan C saat ini tengah sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Sumenep Madura, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan pokok dan lain-lain. Kabupaten Sumenep memiliki potensi fosfat yang besar tentunya tidak akan lepas dari upaya eksplorasi tambang fosfat itu sendiri. (Hartanto & Suyoto, 2017). Namun, hal yang menjadi problematika antara pendapatan negara dan lingkungan, karena kita ketahui Bersama bahwasanya pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pertambangan. Akan tetapi, masih banyak pertambangan yang belum dikelola secara efektif oleh pemerintah (Nordiansah & Resdiana, 2022).

Kelompok literatur kedua membahas tentang dampak pertambangan fosfat bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Asril, 2014), (Setiawan & Ubaidullah, 2019), (Junita & Handoko, 2020), (Hariawan et al., 2018), dan (Wijaksana, 2018). Saat ini dampak persoalan lingkungan sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan terutama oleh pemangku kebijakan. Salah satu permasalahan lingkungan yang perlu diamati saat ini di Pulau Madura adalah persoalan lingkungan yang terjadi Kawasan Bentang Alam Batu Karst Sumenep (Hariawan et al., 2018). Ketergantungan negara kepada pertambangan justru akan membuat banyaknya korupsi dan melebarnya jurang kemiskinan. Eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Sumenep secara besar-besaran akan memperlebar jurang kemiskinan, hal ini dapat dibuktikan dengan pertambangan yang telah terjadi di berbagai penjuru dunia (Ardianto, 2016).

Kelompok literatur terakhir mengenai dampak pertambangan Sumber Daya Alam bagi Masyarakat terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian dari (Hakim, 2014), (Risal et al., 2013), (Siregar et al., 2021), (Julitra et al., 2022), dan (Fitriyanti, 2016). Industri pertambangan di Indonesia selalu menjadi poros dominan dalam mendongkrak ekonomi nasional. Tanpa menepikan dampak positifnya, dampak negatif pertambangan dalam segi lingkungan, sosial, politik, dan budaya sangatlah dahsyat. Dampak negatif tersebut cenderung lebih besar di negara-negara berkembang ataupun di negara yang memiliki kendala dalam ketidakefektifan system pemerintahannya. Regulasi (perundangan) yang kurang memadai serta tingginya gejolak sosial politik. Secara regulasi pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan kedigdayaan pertambangan di Indonesia. Meskipun dengan menggadaikan nasi banak cucu bangsa di masa yang akan datang. Pemerintah berani untuk membuat kehancuran lingkungan hidup, membiarkan penderitaan masyarakat adat, menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, serta kehancuran lingkungan di pulau-pulau (Hakim, 2014).

Terdapat 1271 izin penambangan batubara sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 di Kalimantan Timur sehingga menjadikan Indonesia produsen batubara

terbanyak di dunia. Dengan hampir 61% produksi batubara nasional di Kalimantan Timur menjadikan provinsi ini sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia. Sebuah hal yang menyedihkan sebuah provinsi yang menjadi produsen batubara nasional terbanyak sehingga menambah kantong-kantong ekonomi negara tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya yang tumbuh 3,7% per tahun. Pejabat pemerintah di tataran tingkat lokal maupun nasional selalu mengatakan bahwa keberadaan industry pertambangan di suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya. Namun kenyataan yang dialami masyarakat justru sebaliknya, sejak pertambangan masuk di daerah mereka yang kaya akan sumber daya alam, masyarakat semakin dirugikan dan sengsara (Risal et al., 2013).

Tabel 1. 2 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Pertambangan Fosfat Secara Umum	(Nordiansah & Resdiana, 2022), (Nalle, 2016), (Hartanto & Suyoto, 2017), (Johan & Ediwarman, 2011), dan (Yulianti et al., 2020).	Pertambangan fosfat atau golongan C saat ini tengah sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Sumenep Madura, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan pokok dan lain-lain. Kabupaten Sumenep memiliki potensi fosfat yang besar tentunya tidak akan lepas dari upaya eksplorasi tambang fosfat itu sendiri.
2	Dampak Pertambangan Fosfat Bagi	(Asril, 2014), (Setiawan & Ubaidullah, 2019),	Salah satu persoalan lingkungan yang perlu di soroti saat ini adalah persoalan lingkungan

	Masyarakat di Kabupaten Sumenep	(Junita & Handoko, 2020), (Hariawan et al., 2018), dan (Wijaksana, 2018).	yang terjadi Kawasan Bentang Alam Batu Karst Sumenep. Ketergantungan negara kepada pertambangan justru akan membuat banyaknya korupsi dan melebarnya jurang kemiskinan. Eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Sumenep secara besar-besaran akan memperlebar jurang kemiskinan, hal ini dapat dibuktikan dengan pertambangan yang telah terjadi di berbagai penjuru dunia.
3	Dampak Pertambangan Sumber Daya Alam bagi Masyarakat	(Hakim, 2014), (Risal et al., 2013), (Siregar et al., 2021), (Julitra et al., 2022), dan (Fitriyanti, 2016).	Secara regulasi pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan kedigdayaan pertambangan di Indonesia. Meskipun dengan menggadaikan nasi banak cucu bangsa di masa yang akan datang. Terdapat sedikitnya 1271 izin penambangan batubara sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 di Kalimantan Timur sehingga menjadikan Indonesia produsen batubara terbanyak di dunia. Dengan hampir 61% produksi batubara nasional di Kalimantan Timur menjadikan

			<p>provinsi ini sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia. Sebuah hal yang menyedihkan sebuah provinsi yang menjadi produsen batubara nasional terbanyak sehingga menambah kantong-kantong ekonomi negara tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya yang tumbuh 3,7% per tahun.</p>
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pertambangan fosfat secara umum, dampak pertambangan fosfat bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep, serta dampak pertambangan sumber daya alam bagi masyarakat. Maka untuk pembeda dalam penelitian ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang dampak pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 terlebih pada penelitian ini menggunakan teori politik lingkungan Watts (2000), yang dimana teori tersebut belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada Analisa dampak pertambangan fosfat terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di Kabupaten Sumenep tahun 2022.

KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori Politik Lingkungan

Politik lingkungan merupakan politik yang melingkupi pengelolaan sumber daya alam. Michael Watts (2000) mengemukakan bahwa politik lingkungan (Ecology Politic) adalah sebuah studi yang digunakan untuk memahami hubungan antara Masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui analisis kondisi sosial dalam bentuk yang dinamis (akses dan control) terhadap sumber daya alam serta implikasinya terhadap kelestarian lingkungan yang nantinya untuk keberlanjutan kehidupan. Menurut R.D. Holsworth (1979), politik lingkungan merupakan sebuah politik yang actual karena prihatin kepada lingkungan atau aktivisme lingkungan. Menurut Michael E. Kraft (2011), politik lingkungan memiliki tiga cakupan yaitu, pertama tentang ilmu pengetahuan, kedua tentang ekonomi, dan yang terakhir tentang etika lingkungan.

Menurut Michael Watts (2003) dan Paul Robbins (2004), ada beberapa indikator yang mengindikasikan munculnya ekologi politik. Banyak penelitian ilmiah sosial, seperti yang dilakukan oleh Piers Blaikie pada tahun 1985, telah menunjukkan bahwa masalah dengan lingkungan, seperti penyamaan erosi, sebenarnya masalah politik dan ekonomi. Menurut Piers Blaikie dan H. Brookfield (1987), promotor pendekatan pertama, mendefinisikannya sebagai berikut. "Ekologi politik adalah keprihatinan ekologi dan ekonomi politik yang didefinisikan secara umum" (analisis yang memperhitungkan ekologi dan apa yang secara longgar digambarkan sebagai ekonomi politik) (hal.17). Teori-teori ekonomi dan politik yang dibahas di sini terinspirasi dari tulisan-tulisan Karl Marx tentang berbagai kekacauan sosial yang muncul dari proses-proses produksi dalam sistem kapitalis. Menurut Michael Watts (2003), muncul pertanyaan tentang siapa di antara para ahli yang menghasilkan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan

pemisahan manusia dari lingkungan. Pengetahuan ini dikatakan berasal dari setiap proses produksi, seperti apa, serta dari pihak yang dapat mengaksesnya dan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengontrol produksinya, serta hasil dari pengetahuan tersebut.

Menurut Piers Blaikie (1985), tidak mungkin untuk memahami bagaimana lingkungan suatu tempat berubah hanya dengan mengamati berbagai proses lokal. Sebaliknya, informasi ini harus diperoleh dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi baik di dalam lokasi itu sendiri (berbasis tempat) dan di tempat lain (berbasis tempat), yang dapat memiliki dampak jangka panjang atau sementara pada akses ke dan kontrol atas area tertentu dari lokasi target. Menurut Piers Blaikie (1985), ada sejumlah faktor lokal yang berkontribusi terhadap perubahan lingkungan. Diantaranya adalah sebagai berikut: proses mengungkapkan pendapat dalam suatu kelompok atau komunitas yang berkecukupan; adanya lembaga lokal (seperti sistem hukum formal dan hukum informal) yang menghalangi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumberdaya bagi individu, keluarga, kelompok, atau komunitas; Selain yang disebutkan di atas, faktor eksternal lain yang mempengaruhi pengaturan lokal meliputi: kebijakan pemerintah mengenai penggunaan lahan dan pengawasan sumber-sumber alam; komitmen para aktor untuk memajukan kebijakan mengenai akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam; harga komoditas di pasar nasional dan internasional; sistem pajak; dan praktik lain yang memengaruhi perubahan pertanian seperti komersialisasi jumlah. Ini juga menunjukkan bahwa perubahan lingkungan lokal dalam konteks tertentu adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks.

Menurut Richards Peet dan Michael Watts (1996), terdapat berbagai sudut pandang ekologis konseptual politik, antara lain:

- 2.1.Salah satu konsep marginalitas yang ditekankan adalah bahwa marginalisasi masalah sosial merupakan penyebab dan akibat dari degradasi lahan.

2.2. Tekanan produktivitas sumber daya ditransmisikan melalui jejaring sosial yang mempromosikan lahan yang lebih padat penduduknya.

2.3. Kurangnya data lingkungan dari sejarah kedalaman yang terkait dengan analisis rantai penjelasan paksaan pendekatan jamak. Sebagaimana dinyatakan, setiap orang harus menerima "persepsi jamak, definisi jamak, dan rasionalitas jamak". Implikasi dalam kalimat ini adalah bahwa keuntungan satu orang adalah kerugian orang lain.

2. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial diartikan sebagai sebuah bentuk aksi bersama dengan tujuan konfliktual yang jelas dengan lawan sosial atau lawan politik tertentu, dengan dilaksanakan dalam sebuah jejaring lintas kelembagaan yang solid oleh para aktor yang diikat sebuah solidaritas dan identitas bersama yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan yang telah ada (Triwibowo, 2006). Definisi ini mengacu terhadap gagasan M. Diani dan I. Bison yang diterbitkan oleh Universitas Trento pada tahun 2004, yang mengatakan: *"In the old concept, a social movement can be interpreted as an organized step in creating a social movement"* (Secara konsep lama, gerakan sosial dapat diartikan sebagai sebuah Langkah yang terorganisir dalam menciptakan sebuah gerakan sosial). Selain itu, terdapat pula pengertian lain, yaitu *"In short, a social movement as a joint step that aims to campaign for or reject a change that occurs in the lives of community groups"* (Secara singkat, Gerakan sosial sebagai Langkah Bersama yang bertujuan untuk mengkampanyekan atau menolak suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kelompok masyarakat). Terdapat pula definisi yang "terkenal" dalam gerakan sosial, yaitu: *"A characteristic of social movement activities is to group information from various individuals or groups that focus specifically on social*

or political issues, by implementing, rejecting, or thwarting a social change that occurs” (Suatu ciri dari kegiatan Gerakan sosial adalah mengelompokkan informasi dari berbagai individu atau kelompok yang berfokus secara khusus terhadap isu sosial atau politik, dengan melaksanakan, menolak, ataupun menggagalkan sebuah perubahan sosial yang terjadi).

Secara umum, kajian-kajian tentang gerakan sosial, terkhusus di Indonesia memiliki acuan pemetaan kerangka analisis teoritiknya terhadap gagasan Rajendra Singh (2001). Menurut Rajendra Singh (2010: 111), pada umumnya secara teoritis kajian mengenai gerakan sosial diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi, yaitu: (1) Klasik, (2) Neo-Klasik, dan (3) Gerakan Sosial Baru. Lebih lanjut, Singh (2010: 111) memaparkan bahwa Gerakan klasik melingkupi Sebagian besar kajian-kajian dalam perilaku bersama seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan), dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), secara utama dilakukan oleh para psikolog sosial dan para sejarawan barat sebelum tahun 1950-an. Dalam Gerakan klasik, akar konsep kajian Gerakan sosial dan Tindakan Bersama Sebagian memiliki letak dalam Gerakan psikolog sosial lama. Peranan dari para psikolog seperti kajian dari Gabriel Tarde yaitu *Laws and Imitation* (1903), kajian dari Gustave Le Bon yaitu *The Crowd* (1909), kajian dari William McDougall yaitu *The Group Mind* (1920), dan kajian E.D Martin yaitu *The Behavior of Crowd* (1929) bisa membantu untuk menjelaskan pondasi teoritis dalam kajian perilaku bersama.

Gerakan neo-klasik disambungkan dengan tradisi utama dalam kajian gerakan sosial lama (*Old Social Movements*). Kajian dalam Gerakan neo-klasik kebanyakan dipublikasikan pasca 1950-an. Gerakan ini dibagi kedalam dua model gerakan sosial lama, yaitu fungsioanal dan dialektika Marxis. Berbeda dengan kajian

gerakan sosial klasik, kajian Gerakan sosial neo-klasik menghadirkan peran sosiolog dari barat dan India.

1.6. Definisi Konseptual

1. Politik Lingkungan

Politik Lingkungan (*Ecology Politic*) sebuah studi yang digunakan untuk memahami hubungan antara Masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui analisis kondisi sosial dalam bentuk yang dinamis (akses dan control) terhadap sumber daya alam serta implikasinya terhadap kelestarian lingkungan yang nantinya untuk keberlanjutan kehidupan.

2. Gerakan Sosial

Gerakan sosial (*Social Movement*) adalah sebuah bentuk aksi bersama dengan tujuan konfliktual yang jelas dengan lawan sosial atau lawan politik tertentu, dengan dilaksanakan dalam sebuah jejaring lintas kelembagaan yang solid oleh para aktor yang diikat sebuah solidaritas dan identitas bersama yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan yang telah ada.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya defisini operasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada dalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini tentu akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Indikator Teori Konseptual Politik Lingkungan Wats

Konsep	Variabel	Indikator
--------	----------	-----------

Politik Lingkungan	Akses (<i>access</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akses kepada para investor tambang akibat perubahan RTRW Pemkab Sumenep 2013-2033. 2. Lemahnya perkenomian menjadi penyebab rakyat mengakses tambang tidak berizin (tambang rakyat).
	Kontrol (<i>control</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kontrol penuh dari masyarakat terhadap pertambangan fosfat. 2. Adanya partisipasi tokoh agama dalam mengontrol kebijakan tambang. 3. Adanya perumusan penolakan dari organisasi para tokoh agama. 4. Terdapat gerakan sosial dari organisasi kepemudaan sosial untuk mengontrol kebijakan.
	Kondisi Sosial (<i>social conditions</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan sosial yang dialami masyarakat. 2. Adanya pelembagaan dari tokoh-tokoh agama untuk menolak tambang. 3. Adanya hubungan patronase elit pemerintah dan beberapa tokoh agama.

METODE PENELITIAN

1.8. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan fokus pada fenomena dan realitas sosial yang terjadi dan mengembangkan teori sosial yang didapatkan melalui empiri sesuai dengan fenomena dan kasus yang sedang diteliti (Somantri, 2005). Pendekatan dalam penelitian ini merupakan studi kasus, pendekatan studi kasus merupakan sebuah riset yang mengkaji sebuah kasus atau sebuah keputusan dalam kehidupan saat ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang spesifik dengan menggunakan berbagai sumber informasi seperti, wawancara, observasi, artikel online dan lain-lain (Al-Hamdi et al., 2020b). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penyajian data dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar atau kalimat yang memunculkan pemahaman yang nyata dengan deskripsi kalimat yang mendalam, rinci dan lengkap menjelaskan situasi yang sebenarnya (Nugrahani, 2014).

1.9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah yang terkena dampak pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep.

1.10. Unit Analisa

Tabel 3.1 Unit Analisa Data

No.	Lokasi	Jumlah		Narasumber
1	Tokoh Masyarakat Sumenep	3		Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumenep
2.	Forum Sumenep Hijau (FSH)	1		Koordinator Forum Sumenep

				Hijau (FSH)
3.	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Kabupaten Sumenep	1		Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Kabupaten Sumenep
4.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur	1		Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kabupaten Sumenep
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep	1		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep

1.11. Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data dengan didapatkan secara langsung (Sugiyono,

2013). Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan lain-lain oleh pihak pertama (Suharsimi, 2013).

Tabel 3.2 Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Krisis Sosio-Ekologis yang diakibatkan oleh pertambangan fosfat	Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumenep	Wawancara
2.	Peran barisan kyai dalam penanganan pertambamngan fosfat illegal	Forum Sumenep Hijau (FSH)	Wawancara
3.	Peran Organisasi Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan fosfat	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Kabupaten Sumenep	Wawancara
4.	Peran NGO dalam merespon dampak kerusakan pertambangan fosfat	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur	Wawancara
5.	Implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) no. 12 tahun 2013 serta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Wawancara

	dampak krisis sosio-ekologisnya	Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep	
--	---------------------------------	------------------------------------	--

2) Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer yang sudah didapatkan tidak secara langsung melalui pihak pertama namun bisa bermanfaat sebagai penunjang data dalam sebuah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berbentuk buku, jurnal, artikel, kajian pustaka atau dokumen-dokumen lain yang didapatkan melalui buku secara langsung, internet, ataupun arsip dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan politik lingkungan di pertambangan fosfat Kabupaten Sumenep.

Tabel 3.3 Data Sekunder

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah masyarakat yang terdampak pertambangan fosfat	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Dokumentasi
2.	Data dan kegiatan LSM dalam penanganan dampak	Forum Sumenep Hijau, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan	Dokumentasi

	pertambangan fosfat	Sumber Daya Alam Sumenep dan Walhi Jawa Timur	
--	---------------------	---	--

1.12. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknis pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban permasalahan dari penelitian. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain :

a) Wawancara

Salah satu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dalam hal ini yang dimaksud adalah pewawancara dan yang diwawancarai atau narasumber atau sumber informasi penelitian.

Tabel 3. 4 Data Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumenep	3
2.	Koordinator Forum Sumenep Hijau (FSH)	1
3.	Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Kabupaten Sumenep	1
4.	Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kabupaten Sumenep	1
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep	1

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data merupakan suatu teknik dengan menggunakan arsip, gambar, foto, film, catatan, ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai arsip data dari masa lampau atau peristiwa yang telah terjadi serta memudahkan peneliti terhadap keabsahan dan kelengkapan data. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang akan digunakan perlu memperhatikan terkait validitas, kredibel, representatif, dan maknanya.

c) Observasi

Observasi menjadi salah satu teknik penting dalam pengumpulan data. Observasi merupakan keseluruhan yang dilihat dan didengar pada sumber penelitian dengan analisis dan pencatatan secara sistematis tingkah laku individu dan atau kelompok yang diteliti. Dalam penelitian ini membutuhkan pengamatan yang tidak terbatas pada informan atau seseorang, namun pengamatan juga perlu dilakukan pada objek seperti peristiwa, benda, alam, dan lain-lain. Nugrahani (2014) juga menguraikan tahapan observasi antara lain pengamatan deksriptif, terfokus dan terseleksi. Ditinjau berdasarkan pelaksanaannya, observasi terbagi menjadi dua yakni observasi berperan dan observasi tidak berperan atau tanpa partisipan.

1.13. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses menggolongkan data serta menjadikannya lebih spesifik dan detail. Hal tersebut dilakukan agar data yang terkumpul dapat dipahami oleh pembaca sehingga hasil temuan yang diperoleh dapat secara mudah diinformasikan kepada orang lain. (Al-Hamdi et al.,

2020a) proses analisis data dapat dilakukan melalui empat langkah yaitu:

Gambar 3.1 Empat Langkah Dalam Analisa Data



Sumber: Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020)

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data: Pada tahap ini setelah proses pengumpulan data telah selesai, dilakukan proses penyalinan hasil rekaman suara wawancara menjadi teks. Data-data yang sudah terkumpul baik hasil wawancara ataupun data yang berupa fisik akan dipilih serta dipilah sesuai dengan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan.

- b. Seleksi data: Tahap ini berisi tentang kegiatan memilih data yang relevan dan berguna dalam proses analisis, selain itu data-data yang kurang relevan dengan topik penelitian akan disisihkan.
- c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data: Setelah melalui langkah seleksi data selanjutnya tahap mengkaitkan temuan satu variabel dengan variabel yang lain. Selain itu terdapat tahap yang penting yaitu verifikasi data, proses ini dilakukan jika terjadi ketidakcoockan data yang ditemui peneliti maka dianjurkan mengonfirmasi kepihak terkait agar validitas analisis dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan: Tahap penafsiran merupakan langkah untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis antar-variabel dan verifikasi data. Hasil penafsiran tersebut merupakan dasar dari ditariknya kesimpulan yang menjadi bab akhir dari rangkaian penelitian. Implikasi teoritis, implikasi praktis, saran dan juga rekomendasi juga perlu dicantumkan pada bagian kesimpulan.